Program Pendampingan Aparat Desa dalam Mencetak Desa Melek Akuntansi

Herlina Pusparini, Nurabiah*, Yusli Mariadi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram, Indonesia

Kata Kunci:

pendampingan,
aparatur desa,
penatausahaan,
pelaporan

Abstrak:

UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa memunculkan harapan baru untuk terciptanya kemajuan pembangunan di pedesaan, dana milyaran itu juga menjadi tanggung jawab besar yang akan dipikul pemerintah daerah, khususnya perangkat desa yang bernaung di bawahnya. Tetapi akan ada banyak masalah yang harus dituntaskan, yaitu minimnya pengetahuan aparatur desa dalam tata kelola pengelolaan dan pelaporan keuangan. Desa Pemenang Barat yang ada di kabupaten Lombok Utara NTB merupakan salah satu contoh desa yang mengalami hal serupa. Dimana minimnya pengetahuan aparatur desa dan apalagi ditunjang mereka hanya tamat SD, SMP dan SMA. Kegiatan pengabdian ini akan memberikan pelatihan dan pendampingan dalam hal penatausahaan dan pelaporan keuangan desa. Setelah dilakukan pelatihan dan pendampingan ditargetkan aparat desa dapat mengelola dan melaporkan laporan keuangan desa dengan tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan keuangan desa yang berlaku sehingga akan terbentuk desa yang melek akuntansi. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini yaitu tim pengabdian mendampingi mitra dalam hal penatausahaan dan pelaporan keuangan desa dan selain itu memberikan buku saku pengelolaan keuangan desa. Pendampingan ini dilaksanakan selama 1 kali dengan 7 orang peserta yang berasal dari aparatur desa Pemenang Barat. Adapun pelaksanaan kegiatan pendampingan ini dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, tutorial, dan diskusi. Kegiatan pendampingan ini berjalan dengan lancar. Semua peserta antusias mengikuti acara hingga selesai dan merasakan manfaat pelatihan bagi penatausahaan dan kemajuan desa. Peserta pelatihan juga menilai bahwa pendampingan ini penting dan sangat diperlukan bagi perangkat desa. Peserta berharap pendampingan serupa dapat dilaksanakan kembali dengan peserta (audience) yang lebih banyak/luas, dan dengan topik lainnya.

Korespondensi: nurabiah@unram.ac.id

PENDAHULUAN

Ufuria pengesahan UU Desa menggema di seantero negeri. Penetapan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa ini menandai era baru dan meneguhkan eksistensi desa dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengaturan desa dalam undang-undang ini merupakan upaya untuk melindungi dan memberdayakan desa agar semakin kuat, maju mandiri dan sejahtera. Untuk mencapai hal tersebut, beberapa hak dan wewenang diberikan kepada desa. Salah satunya adalah sumber pendanaan baru bagi desa dari APBN. (*Ikatan Akuntan Indonesia, 2014*)

Triliunan rupiah dana desa menuntut pengelolaan yang baik dari seluruh perangkat desa. Kemampuan untuk membuat sebuah laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban menjadi sebuah keharusan. Tetapi ada banyak masalah yang harus dituntaskan, yaitu minimnya pengetahuan para petugas desa dalam tata kelola pengelolaan dan pelaporan keuangan. Padahal mereka diwajibkan menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana tersebut.

Berdasarkan data RPJMN 2010-2014 ditetapkan jumlah daerah tertinggal ada 183 kabupaten. Dengan dikeluarkannya 70 kabupaten dari daftar daerah tertinggal pada September 2014 maka saat ini tersisa 113 Daerah Tertinggal. Salah satu daerah tertinggal adalah kabupaten Lombok Utara, lebih spesifiknya adalah daerah sangat tertinggal. Dua desa yang merupakan bagian dari kabupaten Lombok Utara adalah desa Pemenang Barat dan desa Pemenang Timur merupakan dua contoh desa yang mengalami hal serupa dengan desa-desa yang ada di Indonesia.

Dari hasil studi pendahuluan tim pengabdian salah satu penyebabnya adalah rendahnya sumber daya manusia yang ada disana. Rata-rata aparatnya hanya lulus SD, SMP, dan sebagian kecil lulus SMA. Rendahnya tingkat pendidikan aparat desa ini menyebabkan minimnya pengetahuan tentang pengelolaan keuangan desa khususnya penatausahaan dan pelaporan keuangannya. Sampai saat ini aparat desanya masih bingung dalam hal pengelolaan keuangan khususnya penatausahaan dan pelaporan keuangan desa tersebut.

Kegiatan pengabdian bagi Masyarakat ini akan memberikan pelatihan dan pendampingan dalam hal penatausahaan dan pelaporan keuangan desa. Setelah dilakukan pelatihan dan pendampingan ditargetkan aparat desa dapat mengelola dan melaporkan laporan keuangan desa dengan tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan keuangan desa yang berlaku sehingga akan terbentuk desa yang melek akuntansi.

Persoalannya buka semata lemahnya SDM, melainkan juga ketidaksiapan mental aparat desa. Tanpa sistem yang baik, kucuran dana yang begitu besar akan menambah kekagetan sekaligus mengundang godaan tersendiri untuk menyalahgunakannya. Menghadapi mentalitas koruptif aparat desa itu, selain memberikan pelatihan-pelatihan, tidak kalah penting juga pengawasan yang akan mempersempit ruang bagi tindak penyalahgunaan dan melakukan hal itu tiada lain kecuali dengan memperkuat pendampingan dan pengawalan pengelolaan dana desa secara sistemik.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka perlu dilakukan pendampingan yang bertujuan untuk (1) jasa, dapat memberikan pelatihan dan pendampingan untuk aparat desa dalam hal penatausahaan dan pelaporan keuangan desa (2) metode, yaitu memberikan metode untuk penyusunan penatausahaan dan pelaporan keuangan desa yang sesuai dengan PP No 60 Tahun 2014 (3) program ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas aparat desa dalam menghasilkan laporan keuangan desa yang tepat waktu dan sesuai dengan standar

METODE KEGIATAN

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah pelatihan dan pendampingan dalam hal penatausahaan dan pelaporan keuangan desa. Pelatihan dan pendampingan ini dilakukan selama 6 bulan yaitu 3 bulan sebelum laporan semester pertama yaitu bulan Mei, Juni, dan Juli dan 3 bulan sebelum laporan akhir semester yaitu bulan September, Oktober, dan November. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada kegiatan ini antara lain :

Tahap pertama : membekali mitra dengan pengetahuan dan pelatihan (workshop) penatausahaan dan penyusunan laporan keuangan desa.

Tahap kedua : Setelah mitra memiliki pengetahuan dasar yang cukup, kegiatan dilanjutkan dengan pendampingan dalam menyusun penatausahaan dan pelaporan keuangan desa sampai mitra bisa membuat sendiri.

Tahap terakhir : selama beberapa bulan, tim pengabdian akan terus memonitoring aktivitas aparat desa kedua mitra untuk mengetahui kelemahan serta permasalahan yang dihadapi mitra. Apabila muncul permasalahan baru, maka tim akan mencari solusi bersama-sama dengan mitra.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum membahas hasil yang sudah dicapai dalam rangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, beberapa hal konsep yang sudah dibahas antara lain :

1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah desa, alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kemiskinan konstruksi sebagaimana dimaksud tersebut bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Untuk mewujudkan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang baik Pemerintah Desa harus menganut prinsip yang telah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa.
- b. Pengelolaan keuangan harus direncanakan, dilaksanakan, diawasi dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa.
- c. Pengelolaan keuangan harus menggunakan prinsip hemat, terarah, mempunyai dampak pada masyarakat, terukur dan terkendali.
- d. Pengelolaan keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Tahap-Tahap Pengelolaan Keuangan Desa

Siklus pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sebagai berikut:

- 1) Perencanaan

- a. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- b. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
- c. Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- d. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

2) Pelaksanaan

- a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- b. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- c. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- d. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- e. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- f. Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.
- g. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- h. Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa.
- i. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
- j. Pengadaan kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
- k. Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- l. Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa.
- m. Pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima. Pengajuan SPP terdiri atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Pernyataan tanggungjawab belanja; dan lampiran bukti transaksi.
- n. Berdasarkan SPP yang diverifikasi Sekretaris Kepala Desa kemudian Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- o. Pembayaran yang telah dilakukan akan dicatat bendahara.
- p. Bendahara desa sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3) Penatausahaan

- a. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
- b. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- c. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- d. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

4) Pelaporan

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:
 1. Laporan semester pertama; dan
 2. Laporan semester akhir tahun.
- b. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDes
- c. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- d. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

5) Pertanggungjawaban

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- c. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- d. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri:
 1. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan
 2. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
 3. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Dengan proses penginputan sekali sesuai dengan transaksi yang ada, dapat menghasilkan *output* berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan perundangundangan, antara lain: Dokumen Penatausahaan, Bukti Penerimaan; Surat Permintaan Pembayaran (SPP); Surat Setoran Pajak (SSP); Dan dokumen-dokumen lainnya, Laporan-laporan: Laporan Penganggaran (Perdes APB Desa, RAB, APB Desa per sumber dana); Laporan Penatausahaan (Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pajak, Buku Pembantu, dan Register. (www.bpkp.go.id))

Adapun tahapan yang telah dilakukan dalam pelatihan ini adalah sebagai berikut :

1. Tahap Observasi

Hasil observasi awal menunjukkan bahwa desa Pemenang Barat Lombok Utara merupakan salah satu desa paling terdampak gempa Lombok pada pertengahan 2018 kemarin, sehingga hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan desa belum bisa baik sepenuhnya. Selain itu desa Pemenang barat merupakan salah satu desa yang memiliki banyak dusun, dimana sebanyak 18 dusun. Sehingga dengan banyaknya dusun pengalokasi dana desanya juga semakin banyak dibandingkan dengan desa-desa yang lain. Selain itu desa dalam melaksanakan hak, kewenangan, dan kewajibannya dalam mengelola kemampuan dan potensi yang dimiliki, dituntut untuk dilakukan secara transparansi dalam memberikan informasi, partisipatif untuk terlibat, dan memiliki akuntabilitas yang tinggi. Menurut Astuty dan Fanida (2012) akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan, bukan hanya laporan keuangan saja namun harus memberikan informasi dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik.

2. Tahap Pelaksanaan

Pengabdian ini menfokuskan pendampingan dalam hal penatausahaan dan pelaporan. Dari hasil pengamatan dan wawancara bahwa pada tahap penatausahaan bendahara desa telah melakukan menjalankan tugasnya dimana sudah menerima, menyimpan, menyetor/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran desa, selain itu dokumen-dokumen yang dibutuhkan sudah terpenuhi yaitu buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Begitu juga pada tahap pelaporan, dimana kepala desa telah menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati, selain itu dokumen-dokumen yang dibutuhkan sudah terpenuhi yaitu laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Apalagi dengan adanya penggunaan siskeudes, itu bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan dalam pengelolaan keuangan desa.

Dengan melihat kondisi di desa Pemenang Barat selain didampingi, tim pengabdian telah menyiapkan 2 buku saku antara lain :

- (1) buku saku pengelolaan keuangan desa yang diterbitkan oleh BPKP dimana isinya berupa pedoman setiap tahapan pengelolaan keuangan desa, dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.
- (2) buku saku yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dimana isinya tentang konsep dana desa, evaluasi dana desa, mekanisme penyaluran dana desa, penggunaan dana desa, pengelolaan keuangan desa, pengadaan barang dan jasa, mekanisme pengawasan dan pemantauan dana desa, badan usaha milik desa, kisah sukses desa-desa, dan data alokasi desa.

3. Tahap Evaluasi Kegiatan

Adapun pada tahap evaluasi kegiatan belum dilakukan dan akan dilakukan sekitar bulan Oktober-November 2019. Hal-hal yang jadi tolak ukur pada tahap ini adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Tolak Ukur Pelaksanaan

Tujuan	Indikator Capaian	Tolak Ukur
--------	-------------------	------------

Peserta memiliki kemampuan dalam penatausahaan keuangan desa dalam hal dokumen-dokumen apa saja yang digunakan yang sesuai dalam pengelolaan keuangan desa dan buku-buku yang dikelola oleh bendahara serta pelaksana kegiatan berupa Buku Kas Pembantu Kegiatan, Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank Desa	Peserta mampu menyiapkan bukti transaksi untuk pengeluaran dan dicatat dalam buku kas umum, belanja yang bersifat transfer langsung ke pihak ketiga, Bendahara Desa melakukan pencatatan ke dalam Buku Bank Pencatatan penerimaan baik kas maupun transfer harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah serta dicatat secara benar dan tertib. Ketika Bendahara Desa melakukan penyetoran ke Kas Negara dengan batasan waktu yang diatur dalam ketentuan perpajakan melalui form Surat Setoran Pajak (SSP) maka Bendahara Desa mencatat dalam Buku Pembantu Pajak pada kolom Pengeluaran.	Peserta menyadari pentingnya tahap-tahap atau prosedur dalam pengelolaan keuangan agar semuanya bisa berjalan dengan benar dan tertib
Peserta memiliki kemampuan dalam pelaporan keuangan desa yang sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2014, yang terdiri dari Laporan Semesteran Realisasi Pelaksanaan APB Desa; Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa.	Peserta mampu menyiapkan Laporan Semester Pertama, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan; dan Laporan Semester Akhir Tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya, Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Setiap Akhir Tahun Anggaran, Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa disampaikan kepada bupati/walikota setiap semester.	Peserta menyadari pentingnya ketepatanwaktuan dalam menyampaikan laporan karena itu merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap atasan (khususnya) dan masyarakat (umumnya)

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Melalui pendampingan ini diharapkan para aparatur desa sudah bisa melakukan hal-hal yang dituntut di setiap tahap khususnya pada tahap penatausahaan dan pelaporan.
2. Ada beberapa faktor-faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan pendampingan pengelolaan keuangan desa di desa Pemenang Barat, yaitu : (a) Faktor Pendorong terdiri dari terjalinnya kerjasama antara tim pengabdian dengan bapak/ibu aparatur desa dan selama pelaksanaan kegiatan pendampingan di Pemenang Barat ini seluruh peserta

memberikan apresiasi yang baik. Peserta secara aktif mengikuti kegiatan pendampingan dari awal hingga akhir. (b) Faktor penghambat yaitu jauhnya jarak dari lokasi tim pengabdian, sulitnya menentukan jadwal pertemuan antara tim pengabdian dengan bapak/ibu aparatur desa karena kesibukan dalam menjalankan tugas masing-masing. Tetapi secara keseluruhan tidak ada hambatan yang terlalu teknis maupun administratif.

Saran

Mengingat peserta yang mendapat kesempatan mengikuti pendampingan terbatas dan hanya satu desa disarankan dilakukan pendampingan untuk desa-desa yang lain juga. Oleh karena butuh komitmen antar tim pengabdian dan mitra tempat pengabdian. Dan adanya upaya untuk melanjutkan kegiatan pendampingan serta perlu adanya pembimbingan secara berkelanjutan untuk mendapatkan hasil yang optimal. Disamping itu untuk kegiatan selanjutnya diperlukan dana yang lebih besar.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak-pihak yang membantu yaitu FEB Unram, tim pengabdian dan para aparatur desa Desa Pemenang Barat Lombok Utara yang telah memberi dukungan financial dan moril sehingga bisa terlaksana pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuty E, Fanida EH. 2012. Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) (Studi pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun). Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Universitas Negeri Surabaya.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 2015. Buku Saku Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Sumatera Selatan.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2014. Majalah Akuntan Indonesia Oktober – November. Jakarta.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2018. Buku Saku Dana Desa. Jakarta.